

TINGKAT PELAYANAN PUBLIK, PEMKAB SIJUNJUNG BERSAMA OMBUDSMAN RI ADAKAN SOSIALISASI PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK BAGI NAGARI

Jum'at, 19 November 2021 - Marisya Fadhila

Pemerintah Daerah bersama Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat mengadakan sosialisasi peranan Ombudsman dalam peningkatan kualitas layanan publik bagi Nagari se-Kabupaten Sijunjung. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sijunjung, Iraddatillah di Balairung Lansek Manih Kantor Bupati setempat, Jumat (19/11).

Hadir kesempatan itu, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Adel Wahyudi, Asisten III Setdakab Sijunjung, Edwin Suprayogi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Khamsiardi, Camat, Wali Nagari se Kabupaten Sijunjung, Ketua MUI Sijunjung, Ketua BEM Stiper dan STIT Muaro.

Dalam arahannya, Wabup Iraddatillah mengapresiasi kedatangan Ombudsman di Kabupaten Sijunjung. "Ini merupakan langkah baik untuk mengevaluasi terhadap unit pelayanan yang diberikan kepada masyarakat," ujarnya.

Dikatakan Radi, dengan adanya sosialisasi tentang penyelenggaraan pelayanan publik bagi Nagari di Kabupaten Sijunjung, sehingga menjadi sarana pencerahan akan pentingnya peningkatan pelayanan publik dalam pemenuhan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan.

"Kita harapkan setelah kegiatan ini dilakukan juga penilaian pelayanan publik ditingkat Nagari. Kemaren tingkat Kabupaten kita sudah lakukan penilaian, dan diberikan penghargaan kepada OPD pelayanannya yang prima," terangnya.

Dijelaskan Wabup, masyarakat itu berkeinginan untuk mendapatkan pelayanan yang efisien, reponsif dan akuntabel sepenuhnya.

"Mulai dari Pemerintah Nagari, Kecamatan, Puskesmas, RSUD sampai ke Pemerintah Kabupaten. Pokoknya yang bersifat pelayanan, kedepan mari kita tingkatkan lagi pelayanan publik untuk masyarakat khususnya di Ranah Lansek Manih," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Adel Wahyudi mengatakan tujuan diadakannya sosialisasi itu merupakan bagian dari penguatan kemitraan dan langkah strategis lainnya.

"Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada BAB V peraturan tersebut, jelas tertuang kewajiban unit pelayanan dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan dan komponen yang jelas," katanya.

"Kemudian, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik bisa dimulai melalui standar pelayanan yang diterapkan di setiap unit layanan dan penyelenggara juga memiliki tolok ukur. Masyarakat sebagai pengguna pun mendapat kepastian pelayanan, karena penyelenggaran dan pengguna sama-sama mengetahui hak dan kewajibannya," terangnya.

Ia menambahkan, menjamin kualitas pelayanan publik tidaklah mudah, dimulai dari membangun kesadaran penyelenggara pelayanan publik dan juga perlu pengawasan yang strategis.

"Pengawasan strategis ini meliputi pengawasan internal yang terdiri dari Inspektorat selaku pengawas fungsional, Kemenpan RB, atasan langsung penyelenggara pelayanan publik selaku pengawasan melekat menjadi ujung tombak menjamin kualitas pelayanan publik," jelasnya.

Adel berharap kedepannya Ombudsman dapat bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Sehingga kegiatan pelayanan publik bisa dikerjakan secara bersama. (Dicko)